



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WIDYATMOKO
2. Jabatan : KEPALA BIRO PERENCANAAN, INFORMASI, DAN KERJASAMA
3. NHK : 635135

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.245.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m²/100 m² di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 355.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 246 m²/90 m² di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m²/45 m² di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
4. Tanah Seluas 1190 m² di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000
5. Tanah Seluas 178 m² di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 266.500.000

1. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.500.000
2. MOBIL, HYUNDAI I10 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI ER6 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. MOTOR, HONDA CBR250 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
5. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
6. MOTOR, YAMAHA YUPITER MX 150 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000



7. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	39.400.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	35.055.684
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.585.955.684
III. HUTANG	Rp.	390.836.143
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.195.119.541

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.